



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHADJIR EFFENDY
2. Jabatan : MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
3. NHK : 241724

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 53.436.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 828 m²/600 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m²/68 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 2330 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah Seluas 741 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah Seluas 241 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 681 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
7. Tanah Seluas 1690 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
8. Tanah Seluas 1533 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
9. Tanah Seluas 726 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.089.000.000
10. Tanah Seluas 652 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 978.000.000
11. Tanah Seluas 343 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI



- Rp. 514.500.000
12. Tanah Seluas 648 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 972.000.000
13. Tanah Seluas 1772 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 1.300.000.000
14. Tanah Seluas 1796 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 1.500.000.000
15. Tanah Seluas 2900 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL
SENDIRI Rp. 900.000.000
16. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 1.275.000.000
17. Tanah Seluas 1188 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL
SENDIRI Rp. 900.000.000
18. Tanah Seluas 899 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000
19. Tanah Seluas 2340 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000
20. Tanah Seluas 765 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 1.147.500.000
21. Tanah Seluas 15880 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000.000
22. Tanah Seluas 102 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000
23. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA
BATU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
24. Tanah Seluas 269 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
25. Tanah Seluas 877 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI
Rp. 800.000.000
26. Tanah Seluas 228 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
27. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000
28. Tanah Seluas 948 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

100.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ESCUDO MINIBUS Tahun 1900, HASIL SENDIRI



Rp. 30.000.000

2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2011, HASIL

SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 671.500.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. 49.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.556.020.342**F. HARTA LAINNYA** Rp. 1.437.333.975**Sub Total** Rp. 66.249.854.317**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 66.249.854.317

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.